



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala BNP2TKI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 21 Maret 2011
Waktu	: Pukul 15.00 WIB s.d. selesai
Acara	: Penjelasan Kepala BNP2TKI terhadap 16.704 orang TKI sektor formal yang bekerja di Jepang terkait bencana tsunami.
Ketua Rapat	: Drs.H. Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran	: 31 orang dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR-RI dengan Kepala BNP2TKI dibuka pukul 15.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Kepada BNP2TKI menyampaikan paparan sebagai berikut :

- a. Dasar Pelaksanaan Penempatan TKI ke Jepang
Penempatan TKI *Nurse* dan *Careworker* ke Jepang berdasarkan *Agreement* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dalam kerangka *Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA)* yang ditandatangani oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2007, yang merupakan kerjasama bilateral bidang ekonomi yang juga memuat *Movement National Persons (MNP)* yang antara lain penempatan TKI ke Jepang. Kemudian ditidakanjuti dengan MoU antara Pemerintah Indonesia (BNP2TKI) dan Pemerintah Jepang (JICWELS) yang ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2008 dan diperbaharui terakhir pada tanggal 11 Januari 2011.

b. Penempatan TKI Program G to G ke Jepang

Penempatan TKI *Nurse* dan *Careworker* ke Jepang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dengan jumlah penempatan sebanyak 686 orang, dari jumlah tersebut baru 2 (dua) orang yang lulus ujian nasional *Nurse* di Jepang. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan monitoring penempatan tenaga *Nurse* dan *Careworker* ke Jepang agar dapat meningkatkan lulusan *Nurse* dan *Careworker* tahun yang akan datang, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan kerja dan keberhasilan ujian nasional.

c. Penempatan TKI *Nurse* dan *Careworker* ke Jepang Tahun 2008-2010.

Tahun	Nurse	Careworker	Jumlah
2008	104 orang	104 orang	208 orang
2009	173 orang	189 orang	362 orang
2010	39 orang	77 orang	116 orang
Jumlah	316 orang	370 orang	686 orang

Jumlah permintaan pada tahun 2011 diperkirakan sebanyak 150 orang sedangkan tahun 2012 sebanyak 200 orang

d. Jumlah WNI di Jepang

Data Kemenlu menyebutkan WNI di seluruh Jepang 31.517 orang, WNI di Miyagi 274 orang, WNI di Iwate sejumlah 140 orang, Tokyo sejumlah 24.000, Osaka sejumlah 6.700 orang, sisanya tersebar diberbagai Prefectures.

Dari WNI yang ada di Jepang, 16.704 (53%) adalah TKI yang mayoritas bekerja disektor industri dan kelautan. Jumlah TKI yang dikirim melalui BNP2TKI (Program G to G) hanya 686 orang dengan rincian *Nurse* 316 orang dan *Careworker* 370 orang.

Pengiriman terbanyak melalui Program Magang dan anak buah kapal (ABK) yang jumlahnya 11.877 orang (71%).

e. Peningkatan Kualitas Calon TKI

Peningkatan kualitas keterampilan bahasa Jepang terus ditingkatkan dari sebelumnya pelatihan selama 6 bulan (2008 -2010), sedangkan tahun 2011 selama 9 bulan dan rencana pelatihan bahasa Jepang pada tahun 2012 selama 12 bulan, agar TKI dapat lulus ujian nasional *nurse* dan *careworker* di Jepang.

2. BNP2TKI terus melakukan koordinasi dengan KBRI dan para relawan untuk mengetahui informasi keberadaan dan keselamatan TKI pasca bencana tsunami di Jepang.

3. Mengingat angka kelulusan *nurse* dan *careworker* di Jepang sangat rendah, BNP2TKI akan melakukan peningkatan kualitas ketrampilan para *nurse* dan *careworker* agar tercapai angka kelulusan yang maksimal, khususnya dalam penguasaan bahasa Jepang.
4. Berkaitan dengan pembahasan RUU Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu juga diperhatikan mengenai perlindungan terhadap TKI yang mengikuti program magang di luar negeri serta terhadap TKI di Negara yang mengalami bencana alam.
5. Pemerintah perlu memikirkan bahaya radiasi yang ditimbulkan akibat bocornya reaktor nuklir Fukushima di Jepang yang berdampak kepada para TKI di Jepang. Perlunya klausul dalam kontrak kerja agar pada saat terjadi bencana, para TKI dapat dipulangkan ke Negara asal.
6. BNP2TKI akan terus melakukan pemantauan terhadap proses hukum dalam kasus TKI Darsem dan Sumiyati di Arab Saudi, dimana dalam kasus Sumiyati masih dalam tingkat pengadilan banding, dan dalam kasus Darsem BNP2TKI akan terus mengupayakan dana untuk pembayaran biaya denda agar yang bersangkutan bebas dari hukuman.
7. Pemerintah diharapkan serius dalam menangani berbagai kasus yang menimpa TKI di luar negeri, baik yang dialami TKI berdokumen dan TKI tidak berdokumen, karena persoalan para TKI tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikannya.
8. Untuk mengetahui secara jelas mengenai jumlah TKI yang bekerja di luar negeri, maka BNP2TKI diminta untuk memberikan data-data akurat keseluruhan jumlah TKI yang bekerja di seluruh dunia, persebaran dan profesinya

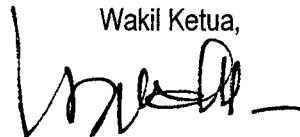
III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk memberikan informasi perkembangan terakhir dan memastikan keberadaan serta keselamatan TKI di wilayah bencana.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk memberikan data TKI di seluruh dunia terkait jumlah, persebaran dan profesinya.
3. Komisi IX DPR RI mendorong dilakukannya evaluasi dan monitoring penempatan tenaga *Nurse* dan *Careworker* ke Jepang mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan kerja dan keberhasilan ujian nasional .

4. Komisi IX DPR RI mendesak peningkatan kualitas ketrampilan bahasa Jepang TKI agar tercapai peningkatan kelulusan ujian nasional *Nurse* dan *Careworker* TKI di Jepang.

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ